

## ABSTRAK

**Hafidi.** 2025. *Analisis Perbandingan Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia antara Negara Maju Skandinavia dan Negara Berkembang Indonesia.* Skripsi, Program Studi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing: Muhammad Hamzah, M.M.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Negara Skandinavia, Negara Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan yang mencolok dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara negara maju di kawasan Skandinavia dan negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara Skandinavia secara konsisten mencatatkan IPM sangat tinggi, sementara Indonesia meskipun mengalami peningkatan setiap tahun, masih tertinggal dan menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, hingga distribusi pendapatan yang tidak adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan capaian IPM antara kedua kawasan tersebut, menelaah strategi dan kebijakan yang diterapkan negara Skandinavia dalam mendorong pembangunan manusianya, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan IPM secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi dan studi komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan *UNDP*, *BPS*, serta berbagai jurnal dan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Skandinavia berhasil membangun IPM yang tinggi berkat kebijakan sosial yang merata, sistem kesehatan dan pendidikan universal, serta tata kelola pemerintahan yang transparan. Sementara itu, tantangan utama di Indonesia berasal dari lemahnya pemerataan pembangunan, rendahnya investasi sumber daya manusia, serta kurangnya efektivitas birokrasi dan partisipasi publik. Kesimpulannya, untuk mendorong peningkatan IPM yang lebih merata dan berkelanjutan, Indonesia perlu memperkuat tata kelola, memperluas akses layanan dasar, dan menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan konteks lokal secara tepat.